



ISSN 2621-458X

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU NELAYAN DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN NAMBO KABUPATEN BANGGAI**

Rifqah Ramdhana Jufri
STIA Abdul Haris Makassar
rifqah.ramdhana18@gmail.com
Ishak
AMIK Luwuk Banggai
ishakdjaelani258@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program kartu nelayan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai. Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Kecamatan Nambo, Sekretaris Camat, dan Masyarakat Nelayan. Pengumpulan informasi menggunakan teknik informasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan suatu efektivitas program kartu nelayan dalam memberdayakan masyarakatnya dengan menggunakan empat indikator, yaitu: 1) Ketepatan sasaran program, meskipun program telah berjalan, tetapi masih terdapat sedikit permasalahan yaitu rumitnya prosedur untuk memperoleh kartu nelayan; 2) Sosialisasi Program, pemerintah telah melakukan sosialisasi program terhadap masyarakat sebelum pemberian bansos kepada masyarakat yang telah memiliki kartu bantuan nelayan; 3) Pencapaian tujuan program, program yang telah dijalankan dapat dikatakan tercapai apabila pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan terlaksana secara efektif dan efisiensi; 4) Pemantauan program, program yang sudah terlaksana dapat dilihat dari pemantauan dari rapat berkala, serta pelaporan, dan kunjungan lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Pemerintah, dan Kartu Nelayan

ABSTRACT

This research is to determine the effectiveness of the fisherman card program in empowering fishing communities in Nambo District, Banggai Regency. This analysis uses qualitative research. The informants for this research were the Head of the Maritime Affairs and Fisheries Service, the Head of Nambo District, the Secretary of the District Head, and the Fishermen's

Community. Information collection uses information techniques, interviews and documentation. In this research, data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show the effectiveness of the fisherman card program in empowering the community using four indicators, namely: 1) Accuracy of program targets, even though the program has been running, there are still a few problems, namely the complexity of the procedures for obtaining fisherman cards; 2) Program Socialization, the government has carried out program outreach to the community before providing social assistance to people who already have fishermen assistance cards; 3) Achievement of program objectives, the program that has been implemented can be said to be achieved if the empowerment of marine and fisheries business actors is carried out effectively and efficiently; 4) Program monitoring, programs that have been implemented can be seen from monitoring at regular meetings, as well as reporting and field visits.

Keywords: *Effectiveness, Government Programs, and Fisherman's Card*



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang nomor dua setelah Kanada yaitu 81.000 km. Luas wilayah teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km² didominasi oleh wilayah laut yaitu kurang lebih 5,4 juta km². Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan melimpah dan tersebar disebagian besar Indonesia.

Namun dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur atau menegakkan aturan, serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek.

Pemerintah sendiri sebetulnya bukan tidak memahami kondisi dan tekanan perekonomian yang di alami oleh masyarakat daerah pesisir, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Pemerintah telah berupaya membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat nelayan dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat.

Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil. Bahkan pengertian itu pun

berbeda dengan pengertian nelayan tradisional dalam penjelasan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta dalam efektivitas pemberdayaannya di masyarakat.

Sedangkan dalam (UU Nomor: 6 Tahun 1996 pasal 4 tentang Perairan Indonesia) berbunyi, Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, jadi semua masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan mempunyai hak yang sama untuk memberdayakan sumber-sumber kekayaan alam yang di laut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pemberdayaan adalah bagian tindakan yang mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional dari orang-orang, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk melakukan pekerjaan dengan kekuatan yang dimiliki, proses pemberdayaan masyarakat faktanya merupakan elemen dari empat fungsi pemerintahan berdasarkan UU Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut sudah terbagi empat bagian fungsi pemerintahan, yaitu pemberdayaan, pembangunan, pengaturan, dan pelayanan. Adapun fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu akan menggambarkan kinerja pemerintah itu sendiri jika pemerintahan berikutnya dapat meneruskan kewajibannya dengan maksimal, maka tugas pokok dapat dijalankan dengan sempurna contohnya pelayanan menghasilkan keadilan, pemberdayaan menghasilkan kemandirian, dan pembangunan menghasilkan kemakmuran.

Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting dan mutlak dilakukan setiap pemerintah daerah, dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan masyarakatnya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Oleh karena itu, pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan untuk meningkatkan harkat serta martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Sumber perikanan di Indonesia tidak terlepas dari namanya Kota-Luwuk, Kota-Air merupakan kabupaten administratif di provinsi Sulawesi Tengah, yang termasuk kota penghasil

ikan terbesar ke 7 secara Nasional, data terakhir yang di ambil dari (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah) produksi ikan di Kabupaten Banggai tahun 2022 adalah 21.952 ton.

Masyarakat yang ada di kabupaten Banggai, contohnya di kecamatan Nambo, memiliki banyak potensi guna membantu, menunjang dan mendukung program-program pembangunan di kabupaten Banggai. Potensi yang dapat digali dan lebih diberdayakan pada masyarakat di Kecamatan Nambo yang berada di wilayah pesisir pantai, sehingga banyak penduduk di Kecamatan Nambo bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat nelayan menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kultural dibanding dengan kelompok masyarakat lain. Pemerintah telah berupaya, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan berada dibawah garis kemiskinan, sehingga para nelayan tetap tidak berdaya. Hal ini mungkin dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah kurang memfasilitasi nelayan dalam hal memberikan akses informasi dan teknologi yang masih sulit didapatkan oleh nelayan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kecamatan Nambo menerbitkan kartu nelayan, kartu ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, kartu Kartu Nelayan ini berfungsi juga sebagai identitas profesi pelaku usaha.

Program kartu nelayan ini sudah berjalan tetapi belum semua merasakan kegunaan kartu tersebut, dikarenakan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Nambo belum sepenuhnya tahu akan manfaat program kartu nelayan, dalam memudahkan profesi mereka sebagai nelayan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu di analisis lebih mendalam dan diketahui lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan hal tersebut, atas dasar permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian mendalam terhadap Efektivitas Program Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait.

Menurut Mardiasmo, (2019) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Amin Tunggal Widjaya (2019) Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.

Menurut Ravianto (2019) efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombak dalam mengukur baik tindakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah dirancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.

Menurut Gibson (2021) Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

2. Konsep Program Pemerintah

Konsep program pemerintah merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya akan dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Menurut Hans Hochholzer (202) Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam

rangka kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan serta sarana yang ditetapkan.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2019). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Menurut Mubarak (2020) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

4. Konsep Profesi Nelayan

Profesi nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya, 2022). Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

- a. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka;
- b. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa Koyoan, Koyoan Permai, Lumbe. Padungnyo, dan Sayambongin; dan
- c. Dari segi tampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

B.METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moeleng, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kecamatan Nambo;
2. Sekretaris Kecamatan Nambo;
3. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai; dan
4. Masyarakat nelayan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai;

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang terkait dengan efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai dengan menggunakan 4 langkah

1. Ketepatan Sasaran Program;
2. Sosialisasi Program;
3. Pencapaian Tujuan Program; dan
4. Pemantauan Program;

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan Sasaran Program

Dalam pemenuhan pemberdayaan masyarakat nelayan, program merupakan salah satu dari kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah agar menimbulkan efek sistematis dan terencana yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, keunggulan komperatif, potensi dan tantangan.

Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, biasanya menyangkut jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, dan tanggungjawab serta kejelasan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, program kartu nelayan yang telah diterbitkan oleh Bapak Camat Nambo selaku organisasi pemerintah pada tahun 2021 telah berupaya dengan adanya program kartu nelayan yang dikeluarkan, sehingga melalui program Kartu Nelayan tersebut nelayan pun dipermudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Program kartu nelayan juga diharapkan menjadi materi kongkrit dalam proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengolahan sumber daya perikanan dan upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu tersendiri dalam penyaluran program Kartu Nelayan, permasalahan ini ditandai dengan kondisi atau fakta yang ada di lapangan. Beberapa isu yang menjadi pertimbangan dalam keefektifitasan program Kartu Nelayan, antara lain:

- a. Rumitnya prosedur untuk memperoleh kartu nelayan dikarenakan nelayan dengan skala kecil harus menggunakan surat rekomendasi dari perangkat daerah; atau
- b. Belum adanya transparansi data kuota untuk penerima kartu nelayan;

Program Kartu Nelayan seharusnya bertujuan untuk memberikan layanan dasar, dan merevitalisasi ekonomi masyarakat serta memudahkan dan mempererat hubungan antar masyarakat nelayan dengan perangkat daerah Kecamatan Nambo. Meskipun program Kartu Nelayan menunjukkan perkembangan cukup baik, namun efektivitas program Kartu Nelayan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya permasalahan di lapangan.

2. Sosialisasi Program Pemerintah

Pentingnya bahwa program harus disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini Camat Nambo, Kabupaten Banggai dipandang sebagai salah satu perpanjangan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat dalam hal ini penyebaran informasi. Selain itu Camat Nambo

harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan sosialisasi program Kartu Nelayan

Merujuk pada kepentingan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat, pemerintah harus bisa menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, serta menerangkan dan menginformasikan kepada masyarakat nelayan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan program Kartu Nelayan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan cara memberikan program agar dapat membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dengan cara melakukan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan dan sudah di realisasikan dan terlaksana dengan baik. Dengan adanya program kartu nelayan ini diharapkan masyarakat nelayan dapat menerima bantuan sosial yang disalurkan setiap tahunnya dari pemerintah.

3. Pencapaian Tujuan Program Pemerintah

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya yang dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan ini terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi, seperti waktu, sasaran atau target, dan dasar hukum.

Untuk mencapai tujuan program yang telah dibuat, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan pelayanan umum sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar dapat mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian program Kartu Nelayan sebagaimana disebutkan di atas dapat dicapai apabila perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas, dan efisiensi yang terlaksana. Salah satu nilai penting yang bisa diterapkan dalam pencapaian program Kartu Nelayan adalah pemberdayaan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaannya, program yang di buat oleh pemerintah sudah terlaksana serta mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya karena dari perencanaan sampai pelaksanaannya sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Nambo. Masyarakat nelayan di Nambo dan terkhusus di Desa Koyoan, Koyoan Permai, Lumbe, Padungnyo, dan Sayambongin sudah banyak menerima bantuan dari program tersebut.

4. Pemantauan Program Kartu Nelayan

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemerintah Kabupaten Banggai khususnya, pemerintah Kecamatan Nambo melakukan pemantauan:

- 1) Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara terus menerus mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
- 2) Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
- 3) Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan;

Pelaksana pemantauan untuk sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah masing-masing Pengelola Kegiatan atau Satuan kerja di daerah serta komponen pembina atau penanggungjawab kegiatan pusat, yang hasilnya menjadi input bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

Lingkup pemantauan terdiri dari seluruh aspek yang berkaitan dengan program atau kegiatan baik aspek perencanaan, aspek penyaluran atau pencairan dana, aspek pelaksanaan maupun aspek pelaporan. Bentuk pemantauan dapat melalui rapat berkala, Pelaporan maupun kunjungan lapangan, objek pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana kerja, dengan fokus pelaksanaan program dan kegiatan dan bentuk produk (akhir) pemantauan adalah laporan.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi peneliti di atas tentang efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dapat dikatakan efektif dengan beberapa catatan, hal ini dapat dilihat dari:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Nambo bersama dinas Kelautan dan Perikanan dalam membuat program kartu nelayan, dimana pada awal pembentukan program berjalan dengan lancar dan menjadikan masyarakat nelayan terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. tetapi setelah programnya berjalan terdapat beberapa kendala yang di alami langsung oleh masyarakat nelayan seperti rumitnya prosedur untuk dapat mengakses bantuan kartu nelayan serta tidak adanya transparansi yang jelas akan batas jumlah penerima bantuan Kartu Nelayan;
2. Dalam pelaksanaan program Kartu Nelayan, Pemerintah Kecamatan Nambo telah melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan cara melaksanakan program agar membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, kemudian melakukan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan perangkat Desa atau kelurahan, dan sudah di realisasikan dan terlaksana dengan baik. Dengan adanya kartu program ini diharapkan masyarakat nelayan dapat menerima bantuan sosial yang disalurkan setiap tahunnya dari pemerintah.
3. Dalam kaitannya dengan pencapaian program, pencapaian tersebut dapat tercapai apabila adanya perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi yang terlaksana sehingga masyarakat nelayan di Kecamatan Nambo dapat memperoleh bantuan kartu Kartu Nelayan hingga saat ini.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan suatu program mencakup tahapan mulai dari analisis masalah kemudian dirumuskan yang dimana dalam proses program tersebut telah menjadi pedoman perangkat daerah dalam pemantauan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pemerintah sudah melaksanakan monitoring atau evaluasi program yang dapat berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko, dengan demikian perlu adanya kajian kembali yang dilakukan untuk dapat melihat keefektivitasan program yang

sudah terlaksana terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga nantinya dapat diketahui apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat.

Saran

1. Perlu adanya kejelasan lebih mendalam tentang program kartu nelayan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses program kartu nelayan sehingga menghadirkan program yang terarah dan saling melengkapi serta dibutuhkan transparansi dari pemangku pemerintah akan kuota penerima bantuan Kartu Nelayan;
2. Perlu adanya perhatian lebih mendalam terkait manajemen sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk sosialisasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mengerti dan memahami secara benar serta diharapkan realisasi usulan program dapat meningkatkan efektivitas program Kartu Nelayan;
3. Untuk mencapai target dari sebuah program perlu peningkatan percepatan pelayanan dari pemerintah Kecamatan Nambo terhadap masyarakat nelayan dalam membuat Kartu Nelayan agar program yang sudah terlaksana, hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mematangkan program Kartu Nelayan kedepannya; dan
4. Dalam melakukan monitoring pemerintah harus mengkaji lagi dampak dari program Kartu Nelayan yang sudah terlaksana agar dapat melihat keefektivitasan program yang sudah terlaksana terkait dengan pemberdayaan masyarakat sehingga nantinya dapat diketahui apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Arebaang, Sari Meila, Rorong, J Arie, dan Rares J Joyce, (2022). Efektivitas Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 8: 120
- Budiani, Ni Wayan. (2020). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial* Vol 2 No.1
- Gibson. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
- Gonta Marsela, Rorong, Arie, Dan Kolondam, Helly F. (2022). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Sulawesi Utara Dan Gorontalo Cabang Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Negara*. <http://www.unsrat.ac.id>
- Hans, Hochholzer. (2019). *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia

- Kondoy, Ivone. Rorong, J Arie. dan Londa, Very, (2022) Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Kasawari. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 8: 120. <http://www.unsrat.ac.id>
- Iskandar. (2021) *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Koentjaraningrat. (2019). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nyoman, Sumaryadi I. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Parson, (1994), *The Integration Of Social Work Practice*. California Wardworth Issue. USA
- Ravianto, (2019), *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rumpia, R Giffried. Kiayi, Burhanudin dan Kolondam, Helly F. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara) *Jurnal Administrasi* Vol 5:74. <http://www.unsrat.ac.id>
- Sudjana, Nana. (1990). *Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran*. Bandung: Fakultas Ekonomi UI
- Slamet, (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting Oleh Ida Yustina dan Adjat Sudrajat Bogor. IPB Press
- Suhendra, (2019), *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sutoro Eko, (2022), *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda*. Jakarta. [ElexMediaKomputindo.](https://media.neliti.com/media/publications/52809-ID-peran-pendamping-dalam-program-pendamping.pdf)
- <https://media.neliti.com/media/publications/52809-ID-peran-pendamping-dalam-program-pendamping.pdf>
- Sunyoto Usman, (2021) *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Steers, Richard M. (1985) *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, Tunggal Amin. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Lainnya

- Undang – Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Pengaturan, Pembangunan, dan Pelayanan.
- Undang – Undang Nomor: 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang – Undang Peraturan pemerintah Nomor: 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Undang – Undang Nomor: 32 tahun 2014 Daerah Kelautan Indonesia
- Undang – Undang Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan
- Peraturan Pemerintah Nomor: 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidayaan Ikan